



Penguatan Etika Politik Pancasila bagi Pemilih Pemula melalui Observasi Tradisi Saparan di SMA Islam Plus At Tohari

Ruhadi, Natal Kristiono², Munadi³

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Negeri Semarang

Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

E-mail: ruhadi@mail.unnes.ac.id

Abstract : *Political education for first-time voters plays a crucial role in instilling democratic awareness rooted in Pancasila values. One method that can be implemented is through field observation assignments that utilize local wisdom. This study aims to examine how the Saparan tradition can be used as a learning medium in developing Pancasila political ethics for first-time voters at SMA Islam Plus At Tohari. The research approach used was qualitative, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The results revealed that students' involvement in field observation assignments on the Saparan tradition helped them understand the values of democracy, mutual cooperation, and leadership from a local cultural perspective. The experience of direct interaction with the community also plays a role in shaping ethical political awareness in accordance with Pancasila principles. Therefore, integrating political education with local wisdom through field observation methods can be an effective approach in strengthening the understanding of political ethics for first-time voters.*

Keywords: *Political Ethics, First-Time Voters, Pancasila, Local Wisdom, Saparan Tradition*

Abstrak : Pendidikan politik bagi pemilih pemula memiliki peran krusial dalam menanamkan kesadaran demokrasi yang berakar pada nilai-nilai Pancasila. Salah satu metode yang dapat diterapkan adalah melalui tugas observasi lapangan yang memanfaatkan kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana tradisi Saparan dapat digunakan sebagai media pembelajaran dalam membangun etika politik Pancasila bagi pemilih pemula di SMA Islam Plus At Tohari. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian mengungkap bahwa keterlibatan siswa dalam tugas observasi lapangan pada tradisi Saparan membantu mereka memahami nilai-nilai demokrasi, gotong royong, dan kepemimpinan dalam perspektif budaya lokal. Pengalaman interaksi langsung dengan masyarakat juga berperan dalam membentuk kesadaran politik yang beretika sesuai dengan prinsip Pancasila. Oleh karena itu, mengintegrasikan pendidikan politik dengan kearifan lokal melalui metode observasi lapangan dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam memperkuat pemahaman etika politik bagi pemilih pemula.

Kata kunci: Etika Politik, Pemilih Pemula, Pancasila, Kearifan Lokal, Tradisi Saparan

1. PENDAHULUAN

Sebagai negara yang menerapkan sistem demokrasi, Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas demokrasinya melalui perbaikan dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Peningkatan kualitas pemilu menjadi faktor kunci dalam mengatasi berbagai tantangan, mulai dari representasi demokrasi yang lebih baik, menjaga kepercayaan publik terhadap kontestasi yang bebas dan adil (free and fair election), hingga memastikan integritas penyelenggara serta penyelenggaraan pemilu (Ramadhan & Kurniawan, 2022).

Salah satu langkah penting dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas adalah dengan memastikan adanya mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik bagi penyelenggara

pemilu. Hal ini menjadi krusial, mengingat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari tahun 2012 hingga 2018, tercatat lebih dari sepuluh ribu laporan pelanggaran kode etik yang melibatkan penyelenggara pemilu di berbagai tingkatan.

Etika politik sendiri merupakan cabang filsafat moral yang berfokus pada aspek politik dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, etika politik membahas tanggung jawab dan kewajiban individu baik sebagai manusia maupun sebagai warga negara terhadap negara, hukum, serta aspek sosial lainnya (Suseno, 1986). Lebih lanjut, dijelaskan bahwa "Dimensi Politis Manusia" merujuk pada interaksi dalam masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan yang disebut "politis" memiliki karakteristik utama berupa orientasi terhadap kepentingan masyarakat luas (Bismark & Pasaribu, 2013).

Dalam konteks pemilu, kepatuhan terhadap etika politik oleh para aktor politik menjadi faktor krusial. Etika politik tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip moral, tetapi juga mencerminkan komitmen politisi terhadap perilaku etis. Hal ini berperan penting dalam menjaga kepercayaan publik serta memastikan integritas dalam proses pemilu (Munief^{1*} et al., 2021).

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam membangun etika politik Pancasila bagi pemilih pemula adalah melalui tugas observasi lapangan yang berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal memiliki peran penting dalam membentuk karakter serta nilai moral masyarakat, termasuk dalam ranah politik. Tradisi Saparan, yang masih dipertahankan dalam budaya masyarakat, dapat menjadi media pembelajaran yang efektif dalam memahami nilai-nilai demokrasi, gotong royong, serta kepemimpinan yang selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila.

Sebagai institusi pendidikan berbasis Islam dan kebangsaan, SMA Islam Plus At Tohari memiliki tanggung jawab dalam membekali siswanya dengan pemahaman politik yang beretika. Melalui tugas observasi lapangan dalam tradisi Saparan, siswa dapat mempelajari secara langsung bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana tugas observasi lapangan berbasis kearifan lokal dapat berkontribusi dalam membangun etika politik Pancasila bagi pemilih pemula di SMA Islam Plus At Tohari.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam mengenai proses pembentukan etika politik Pancasila pada pemilih pemula di SMA

Islam Plus At Tohari melalui tugas observasi lapangan yang berbasis kearifan lokal dalam tradisi Saparan.

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi bagaimana pemilih pemula memahami serta menerapkan nilai-nilai etika politik Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks budaya yang berkembang di lingkungan mereka. Dengan metode deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis realitas di lapangan, termasuk interaksi antara siswa, masyarakat, serta nilai-nilai Pancasila yang dapat diinternalisasi melalui kegiatan observasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara, serta dokumentasi terhadap pelaksanaan tugas observasi lapangan dalam tradisi Saparan. Dengan metode ini, penelitian dapat menganalisis sejauh mana kearifan lokal berperan dalam membangun kesadaran etika politik Pancasila bagi pemilih pemula.

Pendekatan berbasis kearifan lokal dalam penelitian ini juga menekankan bahwa nilai nilai demokrasi, kebersamaan, dan gotong royong dalam tradisi Saparan dapat menjadi sarana efektif dalam menanamkan pemahaman politik yang beretika. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek teoritis, tetapi juga penerapan nyata dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Lingkungan Sosial Budaya dalam Tradisi Saparan

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh siswa SMA Islam Plus At-Tohari, ditemukan bahwa lingkungan sosial budaya tempat dilaksanakannya tradisi *Saparan* mencerminkan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila. Tradisi ini menjadi salah satu bentuk ekspresi budaya lokal yang hidup dan terus dipelihara oleh masyarakat sebagai bagian dari warisan leluhur. Tradisi ini juga mencerminkan bentuk aktualisasi nilai-nilai keindonesiaan yang tertanam dalam kehidupan masyarakat desa.

Tradisi Saparan berlangsung dalam suasana gotong royong yang kental. Warga masyarakat dari berbagai latar belakang usia dan profesi terlibat secara sukarela dalam persiapan dan pelaksanaan acara. Mulai dari gotong royong membersihkan area sekitar, memasak makanan secara kolektif, hingga menyelenggarakan pertunjukan kesenian dan ritual keagamaan. Gotong royong ini menunjukkan pengamalan sila ke-3 Pancasila, yakni "Persatuan Indonesia", melalui praktik hidup bersama dalam semangat kekeluargaan. Hal ini sejalan dengan pandangan Koentjaraningrat (2002) yang menyatakan bahwa gotong royong adalah unsur penting dalam struktur sosial masyarakat Indonesia.

Nilai-nilai musyawarah dan mufakat juga terlihat jelas dalam proses perencanaan dan pelaksanaan tradisi ini. Panitia pelaksana melibatkan tokoh adat, tokoh agama, pemuda, dan perangkat desa dalam forum-forum musyawarah. Setiap suara didengar dan dihargai. Inilah contoh konkret dari pelaksanaan sila ke-4 Pancasila, yakni "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Musyawarah tersebut juga menciptakan ruang edukasi politik informal bagi masyarakat, termasuk generasi muda yang mulai memahami proses pengambilan keputusan bersama.

Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan tradisi Saparan juga menunjukkan kepedulian sosial yang tinggi. Kepedulian ini terwujud dalam bentuk solidaritas antarwarga, seperti membantu tetangga yang kurang mampu untuk turut serta dalam perayaan, serta menjaga ketertiban selama berlangsungnya kegiatan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab (sila ke-2 Pancasila) hadir dalam praktik hidup sehari-hari yang mengedepankan empati dan keadilan sosial.

Kondisi lingkungan sosial dalam tradisi Saparan juga mengedepankan nilai toleransi antarumat beragama. Meskipun mayoritas masyarakat beragama Islam, acara ini bersifat inklusif dan terbuka bagi semua warga tanpa memandang agama dan suku. Menurut Alfitri (2016) dalam Jurnal *Komunitas*, praktik budaya lokal seperti ini berperan besar dalam membangun integrasi sosial dan memperkuat jati diri bangsa. Dengan demikian, Saparan tidak hanya ritual budaya, melainkan juga ruang pembelajaran sosial yang menumbuhkan sikap saling menghormati.

Tradisi Saparan pun menjadi ajang regenerasi nilai-nilai budaya lokal yang positif kepada generasi muda. Para siswa yang turut serta dalam observasi bukan hanya belajar mengenali budaya, tetapi juga menghayati nilai-nilai luhur bangsa secara langsung. Hal ini menjadi metode pendidikan karakter yang kontekstual dan bermakna, sesuai dengan pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*). Dalam konteks ini, sekolah menjadi jembatan antara pendidikan formal dan pembelajaran sosial budaya yang hidup di masyarakat.

Secara keseluruhan, kondisi lingkungan sosial budaya dalam pelaksanaan tradisi Saparan menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila bukan sekadar slogan, melainkan nyata dalam tindakan kolektif masyarakat. Dari gotong royong, musyawarah, hingga kepemimpinan lokal yang terbuka, semua merefleksikan etika politik Pancasila yang bersumber dari kearifan lokal. Oleh karena itu, penting bagi pendidikan formal untuk terus bersinergi dengan praktik budaya lokal agar nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dapat ditanamkan secara lebih kontekstual dan bermakna bagi generasi muda.

2. Implementasi Tugas Observasi Lapangan sebagai Pendidikan Etika Politik Pancasila

Tugas observasi lapangan yang dilakukan oleh siswa SMA Islam Plus At-Tohari merupakan pendekatan kontekstual dalam pendidikan kewarganegaraan dan etika politik. Kegiatan ini tidak hanya sebatas pengamatan terhadap tradisi budaya Saparan, tetapi menjadi wahana pembelajaran aktif di mana siswa belajar langsung dari realitas sosial masyarakat. Dengan mendokumentasikan kegiatan, melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, serta mencatat nilai-nilai yang muncul selama pelaksanaan tradisi, siswa tidak hanya menerima pengetahuan pasif, tetapi ikut membentuk pemahaman kritis terhadap realitas politik dan sosial di sekitarnya.

Menurut Anshori (2020), pemilih pemula membutuhkan pendekatan pendidikan politik yang berbasis pada pengalaman nyata agar mereka tidak terjebak dalam sikap apatis dan pragmatisme politik. Pembelajaran melalui observasi tradisi Saparan membuka ruang refleksi kritis terhadap nilai-nilai demokrasi yang hidup di tengah masyarakat. Kegiatan ini mendorong siswa untuk mengenali bahwa demokrasi bukan hanya soal pemilu, tetapi juga menyangkut praktik nilai seperti musyawarah, kesetaraan partisipasi, dan tanggung jawab sosial.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa tradisi Saparan mengandung nilai-nilai inti Pancasila: gotong royong (sila ke-3), penghargaan terhadap keberagaman dan keadilan sosial (sila ke-5), serta nilai ketuhanan (sila ke-1) yang tercermin dalam berbagai bentuk ritual keagamaan. Siswa mengamati secara langsung bagaimana masyarakat menjaga harmoni sosial, melibatkan semua elemen tanpa diskriminasi, dan menjalankan kegiatan kolektif yang memperkuat rasa solidaritas. Praktik semacam ini merupakan bentuk konkret dari etika politik yang hidup dalam budaya lokal.

Dalam konteks ini, pembelajaran melalui observasi menjadi wahana internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai etika politik, sebagaimana dijelaskan oleh Bismark dan Pasaribu (2013) bahwa Pancasila bukan sekadar dasar negara, tetapi menjadi pedoman moral dan etis dalam kehidupan berbangsa. Dengan mengamati bagaimana masyarakat mengambil keputusan melalui musyawarah, membagi peran secara adil, dan menghargai perbedaan, siswa mengalami sendiri bagaimana etika politik dijalankan dalam skala lokal dan nyata.

Etika politik Pancasila yang dibentuk melalui tradisi lokal seperti Saparan memiliki karakter khas, yakni berbasis pada nilai kearifan lokal yang sudah mengakar. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahid (2015) bahwa generasi muda perlu dibekali kesadaran politik yang

tidak hanya rasional, tetapi juga bermoral, berbasis pada nilai-nilai kultural yang telah menjadi identitas bangsa. Tradisi Saparan, dalam hal ini, menjadi media edukasi yang sangat relevan karena mampu menggabungkan antara pembelajaran budaya, sosial, dan politik secara menyeluruh.

Lebih jauh, pelibatan siswa dalam tugas ini bukan hanya membentuk pemahaman kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Mereka tidak hanya mengetahui makna Pancasila, tetapi juga merasakannya melalui pengalaman sosial dan empatik. Hal ini memperkuat teori pendidikan karakter yang menyatakan bahwa nilai tidak dapat hanya diajarkan, melainkan perlu ditumbuhkan melalui keteladanan dan pengalaman hidup (Budimansyah, 2010). Dalam jangka panjang, pendekatan ini sangat potensial dalam membentuk pemilih pemula yang kritis, etis, dan berintegritas.

Dengan demikian, tugas observasi lapangan berbasis kearifan lokal seperti tradisi Saparan bukan hanya menjadi strategi pembelajaran alternatif, tetapi juga menjadi instrumen efektif dalam membentuk kesadaran etika politik generasi muda. Strategi ini memperlihatkan bahwa sekolah tidak bekerja sendiri, tetapi bersinergi dengan masyarakat untuk membangun karakter politik yang Pancasilaistis. Oleh karena itu, kegiatan seperti ini perlu diperluas dan direplikasi di berbagai sekolah sebagai model pendidikan politik kontekstual yang berakar pada budaya bangsa.

3. Kontribusi Tugas Observasi Lapangan terhadap Pembentukan Etika Politik Pancasila

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan siswa dan guru, ditemukan bahwa tugas observasi lapangan dalam tradisi Saparan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan kesadaran etika politik pemilih pemula. Para siswa tidak hanya menjalankan tugas akademik, tetapi juga mengalami langsung bagaimana nilai-nilai Pancasila dihidupkan dalam praktik sosial masyarakat. Mereka mengamati proses musyawarah, keterlibatan warga secara kolektif, serta penghormatan terhadap keberagaman, yang semuanya menjadi pembelajaran konkret tentang tata nilai politik yang berakar pada budaya lokal.

Pembelajaran berbasis pengalaman ini sangat penting bagi pemilih pemula, terutama dalam membentuk kepekaan politik yang etis. Menurut Anshori (2020), pemilih pemula rentan terhadap manipulasi politik karena lemahnya pendidikan politik yang membekali. Dalam konteks tersebut, observasi lapangan menghadirkan realitas sebagai media pembelajaran yang tidak bisa digantikan oleh teori semata. Siswa menjadi lebih reflektif, memahami perbedaan antara praktik politik transaksional dengan politik yang berakar pada nilai-nilai moral dan kebudayaan.

Etika politik, menurut Bismark dan Pasaribu (2013), bukan hanya soal norma formal dalam sistem kenegaraan, melainkan juga mencakup nilai-nilai yang membimbing perilaku politik individu dan kolektif. Dalam konteks ini, tradisi Saparan menjadi wahana pendidikan politik etis yang konkret. Siswa belajar bahwa politik tidak melulu soal kekuasaan, tetapi tentang tanggung jawab moral terhadap sesama warga. Mereka menyaksikan bagaimana tokoh masyarakat bersikap terbuka, melibatkan warga dalam pengambilan keputusan, dan mempraktikkan keadilan sosial secara nyata.

Kontribusi lain yang penting adalah tumbuhnya sinergi antara nilai keislaman, nasionalisme, dan kearifan lokal. Hal ini menjadi jawaban atas tantangan pendidikan karakter yang selama ini masih terfragmentasi. Dalam kegiatan observasi Saparan, nilai-nilai spiritual Islam (seperti syukur dan doa bersama), nasionalisme (cinta tanah air dan penghormatan terhadap simbol budaya), serta kearifan lokal (gotong royong dan musyawarah) berpadu menjadi satu pengalaman pembelajaran yang utuh. Ini sejalan dengan gagasan Azra (2013) bahwa pendidikan karakter yang efektif harus menyentuh dimensi spiritual, sosial, dan budaya sekaligus.

Kegiatan observasi juga menciptakan ruang interaktif antara sekolah dan masyarakat. Sekolah tidak hanya menjadi pusat transfer ilmu, tetapi juga fasilitator pembelajaran kontekstual yang menyatu dengan kehidupan sosial siswa. Seperti yang dijelaskan oleh Wahid (2015), pendidikan politik generasi muda harus berbasis nilai-nilai Pancasila yang hidup di tengah masyarakat. Dengan demikian, tugas observasi lapangan memperkuat peran sekolah sebagai agen transformasi nilai dan karakter politik.

Lebih dari itu, keterlibatan aktif siswa dalam kegiatan lapangan berdampak pada pembentukan identitas politik mereka. Siswa yang semula pasif dalam organisasi kini mulai terlibat dalam forum OSIS, diskusi kebangsaan, dan kegiatan musyawarah sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa observasi lapangan mampu menstimulasi kesadaran partisipatif dan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap kehidupan bersama. Inilah bentuk nyata dari pendidikan demokrasi yang substansial, bukan sekadar prosedural.

Dari keseluruhan proses, dapat disimpulkan bahwa tugas observasi lapangan dalam tradisi Saparan bukan hanya memperkaya wawasan siswa tentang budaya lokal, tetapi juga menjadi alat strategis dalam pembentukan etika politik berbasis Pancasila. Kegiatan ini mendekatkan siswa pada realitas sosial-politik yang sesungguhnya, menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebersamaan, serta menyiapkan mereka sebagai pemilih pemula yang berintegritas, sadar nilai, dan partisipatif. Dalam jangka panjang, inisiatif semacam ini

patut dijadikan model pendidikan karakter dan politik yang kontekstual di sekolah-sekolah lain di Indonesia.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Tugas observasi lapangan yang dilaksanakan oleh siswa SMA Islam Plus At-Tohari dalam tradisi Saparan terbukti menjadi media edukatif yang efektif dalam menanamkan etika politik berbasis nilai-nilai Pancasila. Melalui keterlibatan langsung dalam praktik sosial budaya, siswa mengalami dan memahami secara kontekstual bagaimana nilai gotong royong, musyawarah, keadilan sosial, toleransi, dan kepemimpinan demokratis dijalankan dalam kehidupan nyata masyarakat.

Tradisi Saparan, yang sarat dengan kearifan lokal, menjadi ruang pembelajaran karakter dan politik yang tidak hanya menyentuh aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik siswa. Kegiatan ini menunjukkan sinergi antara pendidikan formal dan kehidupan sosial, serta memperkuat peran sekolah sebagai agen pembentuk warga negara yang sadar nilai dan etis.

Oleh karena itu, disarankan: (1) sekolah-sekolah lain mereplikasi model pembelajaran observasi berbasis budaya lokal sebagai bagian dari pendidikan politik dan karakter; (2) pemerintah daerah mendukung pelestarian tradisi sebagai media edukasi generasi muda; dan (3) guru meningkatkan kolaborasi dengan tokoh masyarakat dalam mengembangkan kurikulum kontekstual berbasis nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Alfian. (1991). *Pemikiran dan perubahan politik di Indonesia*. Gramedia.

Alfitri. (2016). Integrasi sosial melalui tradisi lokal masyarakat Jawa. *Jurnal Komunitas*, 8(2), 123–135.

Anshori, I. (2020). Pendidikan politik bagi pemilih pemula dalam meningkatkan kesadaran demokrasi. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 26(1), 45–56.

Azra, A. (2013). *Pendidikan karakter dalam perspektif Islam*. RajaGrafindo Persada.

Bismark, R., & Pasaribu, F. (2013). *Pancasila sebagai etika politik*. RajaGrafindo Persada.

Budimansyah, D. (2010). *Pendidikan karakter dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan*. Widya Aksara Press.

Dewantara, K. H. (2013). *Pendidikan*. Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.

- Kaelan, M. (2016). *Pancasila: Kajian historis, filosofis, dan yuridis sistem ketatanegaraan Indonesia*. Paradigma.
- Kaelan, M., & Zubaidi, A. (2010). *Pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi*. Paradigma.
- Koentjaraningrat. (2002). *Kebudayaan, mentalitas, dan pembangunan*. Gramedia.
- Mahfud, M. D. (2012). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Press.
- Munief, M. F. M., Kamila, C. A., & Firman, R. A. (2021). Pembelajaran etika politik dalam pendidikan karakter di sekolah. *Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi)*, 2(10), 1707–1715.
- Ramadhan, D., & Kurniawan, B. M. (2022). Limitasi etika pemilu. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(1), 15–30.
- Riyanto, A. (2021). Peran kearifan lokal dalam pendidikan politik pemilih pemula. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 29(2), 78–92.
- Suseno, F. M. (1986). *Etika politik: Prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern*. Gramedia.
- Tilaar, H. A. R. (2012). *Membenahi pendidikan nasional*. Rineka Cipta.
- Wahid, A. (2015). Membangun kesadaran politik berbasis nilai-nilai Pancasila pada generasi muda. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(1), 33–47.
- Winarno. (2014). *Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan*. Bumi Aksara.